



## WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

**I Made Susriana**

Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali; email: umigora@gmail.com

---

#### **Abstract**

*The improvement of the welfare of the regional legislative council has been carried out by the government by issuing government regulation number 18 years of 2017 concerning the financial and administrative rights of the regional council. The policy aims are to improve the implementation of the main duties and functions of the institution, in the Badung regency council. has been carried out but the performance of the agency has not been maximized where the level of attendance of the members of the Badung regency in every plenary session has never been 100%, in fact quite a number are not present without explanation. Then the performance achievements based on their functions are also not maximal visible from the achievements of the resulting draft regulation, subsidy discussion of APBD and APBDP and unplanned supervision. Based on the results of the study stated that the implementation of government regulation number 18 years of 2017 concerning the financial and administrative rights of the leaders and members of the local people's representative councils on the Badung district people's representative council it was found that the implementation policy had not been able to improve the performance of the Badung regency people's representative board. The legislative function has not been achieved as targets in the regional regulation formation program, in the discussion of the Badung district budget and regional budget, as relation to the budget function has not been able to get into substance so that the Badung district budget has a large deficit. Then in the implementation of the supervisory function of the legislature of the Badung district does not have a clear work plan. Constraints faced to improve the performance of the council, where members Badung regency council is prioritizing personal and party interests over the interests of the institution so that it impedes the implementation of the main tasks and functions that lead to the achievement of less than maximum performance. Further solutions that have been carried out The steps to overcome the obstacles that hamper the performance of the Badung regency council representative institutions are (1) Establish the rules of the regency of the Badung regency (2) Provide understanding to members of the Badung regency council regarding the main tasks and functions (3) Make all the equipment available in the Badung district representative board of power.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Performance Improvement*

---

---

## Abstrak

---

Peningkatan kesejahteraan dewan perwakilan rakyat daerah telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif dewan perwakilan rakyat daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung kebijakan tersebut sudah dilaksanakan namun kinerja lembaga tersebut belum maksimal dimana tingkat kehadiran anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung dalam setiap sidang paripurna tidak pernah 100 %, bahkan cukup banyak yang tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian terhadap capaian kinerja berdasarkan pembahasan APBD dan APBDP dan pengawasan yang belum terencana. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung ditemukan bahwa implimentasi kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung. Fungsi legislasi belum tercapai seperti target dalam program pembentukan peraturan daerah, dalam pembahasan APBD dan APBDP kabupaten Badung kaitannya dengan fungsi anggaran belum mampu masuk ke substansi sehingga APBD kabupaten Badung mengalami defisit yang cukup besar. Kemudian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung belum memiliki rencana kerja yang jelas. Kendala-kendala yang dihadapi untuk peningkatan kinerja lembaga dewan, dimana anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan partai dari pada kepentingan lembaga sehingga menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berujung pada capaian kinerja yang kurang maksimal. Selanjutnya solusi yang telah dilakukan untuk meyelesaikan kendala yang menghambat kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung adalah (1) Membuat tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung (2) Memberikan pemahaman kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung terkait tugas pokok dan fungsinya (3) Mengefektifkan semua alat kelengkapan yang ada di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, Peningkatan Kinerja

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisinya. Pelaksanaan otonomi memberikan harapan untuk memepcepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sangat besar untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dibidang legislatif. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas

DPRD tersebut Pemerintah memberikan hak keuangan dan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan mengeluarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.pemberlakuan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja lembaga DPRD.Meskipun peraturan tersebut telah dilaksanakan di DPRD Kabupaten Badung namun tingkat kehadiran DPRD pada saat melakukan rapat rapat yang membahas terkait kebijakan pemerintah belum optimal sehingga berpengaruh terhadap hasil kerja ketiga fungsi lembaga tersebut. Pelaksanaan fungsi legislasi tidak sesuai dengan target program pembentukan peraturan daerah yang di disepakati.Kemudian Pelaksanaan fungsi anggaran belum maksimal sehingga APBD kabupaten Badung mengalami defisit yang cukup besar.Selanjutnya pada fungsi pengawasan DPRD kabupaten Badung belum efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja DPRD kabupate Badung setelah implementasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah ?
3. Apakah solusi untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Badung.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di di kantor dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan

melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan online, di analisis secara interaktif dengan teknik keabsaan data menggunakan model triangulasi.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi kebijakan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung bahwa pelaksana sudah memiliki kepatuhan dan daya tanggap yang baik terhadap kebutuhan kelompok sasaran, namun kinerja yang diharapkan belum bisa terwujud dengan baik, karena kepentingan politik pribadi dan partai lebih diutamakan. maka di dapat kesimpulan bahwa kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat belum bisa dicapai dengan baik.

#### **3.2 Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Meningkatkan Kinerja DPRD Kabupaten Badung setelah Implmentasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori Marillee S Grindle terkait dengan rumusan masalah poin 2 sub bab 1.3 yang di sampaikan pada bab I dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Masih dominannya kepentingan pribadi dan partai dari pada kepentingan terhadap lembaga dewan perwakilan rakyat daerah. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kehadiran, kedisiplinan serta

semangat kerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.3 Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teori Marillee S Grindle terkait solusi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Badung adalah dengan melakukan pendekatan politik melalui pembuatan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah yang baru yang mengacu dengan aturan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Kemudian memberikan pemahaman kepada seluruh anggota dewan akan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya mengefektifkan semua alat kelengkapan dewan yang ada agar mampu berkinerja sesuai dengan target dan harapan

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas mengenai implementasi kebijakan tentang hak keuangan dan administrative Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan tentang hak keuangan dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah terlaksana dengan baik di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, namun kinerja yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut belum maksimal, dimana fungsi legislasi belum memenuhi sesuai dengan target propemperda dan usulan ranperda lebih banyak berasal dari eksekutif, kemudian dalam fungsi anggaran pembahasan yang dilakukan belum mampu masuk ke dalam substansi hingga APBD Kabupaten Badung berkali-kali mengalami defisit yang tinggi selanjutnya pada fungsi pengawasan DPRD belum menyusun rencana kerja yang pasti untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
2. Peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung belum maksimal karena adanya kendala-kendala yang dihadapi yaitu Kepentingan pribadi dan

partai lebih dominan dari kepentingan lembaga sehingga berpengaruh terhadap kedisiplinan, kehadiran serta kemauan untuk bekerja dan berakibat pada kurang produktifnya alat kelengkapan dewan, kemudian kondisi tersebut pada akhirnya membuat fungsi-fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung belum efektif, dimana DPRD Kabupaten Badung belum mampu memenuhi target dalam melaksanakan fungsi legislasi sesuai dengan yang direncanakan dalam pembentukan peraturan daerah, terkait dengan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Badung belum mampu memberikan masukan yang membuat APBD kabupaten Badung realistis. Kemudian terkait fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Badung belum bisa melakukan pengawasan pelaksanaan perda dengan baik sebagai akibat belum adanya rencana kerja yang jelas.

3. Solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung adalah : (1). Membuat Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga sesuai dengan kebutuhan lembaga. (2). Meningkatkan pemahaman anggota DPRD Kabupaten terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat penyelenggara pemerintahan di bidang legislatif. (3). Mengefektifkan semua alat kelengkapan dewan agar bisa melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Badung dalam fungsi Legislasi bisa dilaksanakan dengan merencanakan lebih banyak renperda inisiatif dewan yang bersumber dari usulan komisi-komisi, sehingga target propemperda yang disepakati bersama Bupati bisa tercapai sesuai dengan rencana.
- b. Kemudian terkait dengan fungsi anggaran dari ketepatan waktu pembahasan APBD ,APBDP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sudah sangat baik, namun mencermati kondisi defisit yang terjadi kiranya dalam pelaksanaan fungsi anggaran melalui alat kelengkapan Badan Anggaran bisa membahas lebih detail pada poin-poin potensi Pendapatan serta belanja daerah sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung sehat.

Fungsi Pengawasan sudah dilakukan oleh masing-masing komisi namun untuk lebih meningkatkan kinerjanya perlu di pertegas dengan membuat rencana kerja tahunan DPRD yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja setiap bulan yang ditetapkan dalam rapat paripurna intern sehingga rencana kerja komisi dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dapat terjadwal dengan jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. BUKU**

- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung Alfabeta.
- Budiman, Ahmad. 2011. *Mengukur Citra Dengan Menggunakan Skala Sematik Diffrential*. Jakarta
- Efendi.2008 *The Power Of Good Governance : Teori dan implementasi* Penerbit Selemba Empat Jakarta.
- Gibson,dkk,1987 *Organisassi ,Perilaku, Struktur, Proses*, jilid I alih bahasa NunukArdiarni, Bina Rupa Aksara, Jakarta
- Howlett,Michael and Ramesh, M,1995, *Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsytems*, Oxfor : Oxford University Press
- Hasibuan,Melayu,SP 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta, Gunung Agung.
- Harsono,Hanipah [2002]. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Rosdakarya.
- Hamid,Edy Suandi dan Malian, Sobirin. 2008. *Memperkokoh Otonomi Daerah :Kebijakan,Evaluasi,saran*.Yogyakarta : UII Press.
- Kaho,Josef Riwu,2008 *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, Rajawali Pers.
- Mangku Negara, A.A Anwar Prabu, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Rosdakarya Bandung.
- Mahmudi,2007 *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahsun,Mohamad, 2009 *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*,Yogyakarta :BPFE - Yogyakarta

- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nasir, Muhamad. 2006. "*Metode Penelitian*". Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nunuk Dwi Retnandari, 2013 *Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik*, Pustaka pelajar Yogyakarta
- Usman, Nurudin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Prawirosntana, Suyadi. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia ; Kebijakan Kinerja Karyawan*. Edisi 1. Cetakan Kedelapan BPFE. Yogyakarta
- Prasetyo, Irawan. 1999. *Logika dan prosedur Penelitian, Pengantar teori dan panduan praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Muda*. Cetakan I, STIA LAN Press Jakarta.
- Samodra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Santosa, Amir.
- Sedarmayanti, 2014. *Good Governance*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Soewarno Handyaningrat. 2004. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang 2005, *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D* Alfabeta : Bandung
- Sunggono. 1994 *Pengantar administrasi Publik*, Modul Matrikulasi, MAP-UGM, Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- The Liang Gie 2002. *Kamus Administrasi*, Balai Pustaka .Jakarta
- Wahab Solichin Abdul. 2001. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Wibawa,dkk 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Winarno Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media pressindo, Yogyakarta.

## 2. JURNAL

Tony Kurniadi, AB. Tangdullang, Asmadi (2013),“ *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat*” ,diakses melalui link [https ://www.academia.edu/26426303](https://www.academia.edu/26426303) pada tanggal 18 Desember 2019.

Harius Eko Saputra (2014), “ *Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah “ Studi Deskriptif kualitatif di DPRD Kota Bengkulu*” diakses melalui link <https://media.neliti.com/media/publications/72574> pada tanggal 18 Desember 2019

Endang Benselina Etwiory (2014),“ *Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah*”,diakses melalui link <https://media.neliti.com/media/publications/72574> pada tanggal 18 Desember 2019.

Djauhari,Achmad Ridwan (2015) , “ *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kinerja Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)*”. Diakses melalui link [http ://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1427/1100](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1427/1100) pada tanggal 18 Desember 2019.

Sulistyowati (2015),“ *Kinerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014*”.diakses melalui link <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/1621/1072> Pada tanggal 18 Desember 2019

Suwondo Anwar WS (2016),“ *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ studi kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang periode 2009-2014*” di akses melalui link <http://digilib.unila.ac.id/23839/1/ABSTRAK%20%28ABSTRACT%29.pdf> pada tanggal 18 Desember 2019.

Nuriyatulah, wahid Abdulrahman (2017), “*Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Jawa Tengah*”.di akses melalui link [http ://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/6352/3355](http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/6352/3355) pada tanggal 18 Desember 2019.

- Tanti Dewi Andriani, Sudarsana (2018, “*Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Grobogan*” di akses melalui link <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/download/20742/pdf> pada tanggal 18 Desember 2019
- Moh Syahuddin Mokoagow (2018), “*Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2016*” di akses melalui link <http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/download/41/22p> pada tanggal 18 Desember 2019.
- Tommy Makagasna, Ronny Gosal, Frans Singkok (2018) “*Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe*” di akses melalui link <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/16338/15841> pada tanggal 18 Desember 2019.